

# PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA BAGI HASIL, DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH (STUDI KASUS PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR)

Imel Oktaviani Pramesti

*Imelok19@gmail.com*

Titik Mildawati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

## ABSTRACT

*This research aims to analyze the effect of Local-owned Source Revenue (PAD), Balancing Funds (DBH), and General Allocation Funds (DAU) on the local financial independence level, especially in districts/cities in East Java province. The research applies quantitatively with multiple linear regression as the data analysis technique. Furthermore, the population consists of districts/cities in East Java province. The data collection technique used purposive sampling. In line with that, there were 29 districts and 9 cities in East Java province. The data were taken for 3 years (2021-2023). In total, there were 114 data samples collected. Moreover, the data analysis technique used multiple linear regression with SPSS 26 version. The result shows that PAD has a positive and significant effect on local financial independence. The higher the PAD of districts/cities is, the higher the local financial independence level will be. However, DBH and DAU have a negative effect on the local financial independence level. The higher the receipt from central funds is, the lower the local financial independence level will be.*

*Keywords: local-owned source revenue, balancing funds, general allocation funds, and local financial independence.*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah khususnya di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda. Populasi penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Proses pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Berdasarkan metode *purposive sampling* didapatkan 29 Kabupaten dan 9 Kota di Provinsi Jawa Timur, data penelitian diambil selama 3 tahun, yaitu tahun 2021-2023, sehingga diperoleh 114 data yang sudah diolah. Teknik analisis data yang dilakukan adalah dengan menggunakan Regresi Linier Berganda dengan bantuan program SPSS versi 26. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi PAD suatu daerah, semakin besar pula Tingkat kemandirian keuangan daerah. Sebaliknya DBH dan DAU berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah yang menunjukkan bahwa semakin tinggi penerimaan dari dana transfer pusat, semakin rendah tingkat kemandirian daerah tersebut.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Kemandirian Keuangan Daerah.

## PENDAHULUAN

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan di tingkat lokal. Kemandirian keuangan daerah menjadi salah satu indikator utama dalam menilai kemampuan suatu daerah dalam membiayai kebutuhannya sendiri tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan dari pemerintah pusat. Dalam hal desentralisasi fiskal di Indonesia, kemandirian keuangan daerah sangat dipengaruhi dalam berbagai sumber pendapatan, seperti Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi hasil, dan Dana Alokasi Umum. Oleh karena itu, memahami pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap kemandirian keuangan daerah menjadi hal yang penting untuk dikaji lebih lanjut. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, tujuan dari otonomi daerah yang di Indonesia adalah memberikan pemerintah daerah lebih banyak memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengelola sumber daya lokal yang mereka miliki dan pemerintah daerah dapat mengubah cara mereka mengelola keuangan serta dapat menciptakan pemerintah daerah yang mandiri dalam meningkatkan pelayanan pemerintah, kesejahteraan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat. Otonomi daerah merupakan perwujudan dari sistem pemerintah desentralisasi, adalah perpindahan kewenangan atas pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Kemandirian keuangan daerah adalah bagian yang sangat penting dari penerapan otonomi daerah. Kemampuan suatu daerah untuk membiayai operasi pemerintahannya sendiri tanpa bergantung terlalu banyak pada pemerintahan pusat ditunjukkan oleh kemandirian keuangan daerah. Sumber pendapatan dalam hal ini yang sangat penting adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum dalam menunjang kemandirian keuangan daerah. Dengan demikian, penting untuk menganalisis bagaimana dalam ketiga variabel tersebut bergantung terhadap kemandirian keuangan daerah. Salah satu elemen yang penting menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah adalah Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan umum daerah dalam mendukung suatu kemandirian keuangan daerah. Pendapatan Asli Daerah yang menunjukkan kemampuan suatu wilayah untuk menghasilkan pendapatannya sendiri melalui pajak daerah, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh suatu daerah, semakin besar pula kemampuannya dalam membiayai kebutuhan belanja daerah tanpa ketergantungan tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Namun, realitas menunjukkan bahwa banyak daerah di Indonesia, salah satunya di Provinsi Jawa Timur, masih memiliki Pendapatan Asli Daerah yang rendah sehingga ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat tetap tinggi.

Sedangkan Dana Bagi Hasil adalah dana yang diberikan dari pendapatan pusat daerah ke daerah berdasarkan kontribusi daerah pada sumber daya nasional. Menurut Halim (2007) Dana Bagi Hasil bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan di antara daerah. Namun, Dana Bagi Hasil yang tinggi sering lebih pasif dalam mengelola pendapatan mereka sendiri, sehingga menurunkan keinginan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian Dana Bagi Hasil memiliki dampak positif pada keuangan daerah, tetapi daerah yang cenderung bergantung pada Dana Bagi Hasil memiliki tingkat kemandirian yang rendah, (Khoirunisa dan sulaeman,2022). Dana Alokasi Umum, merupakan dana yang berasal dari APBN, dialokasikan untuk melakukan pemerataan keuangan setiap daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran yang diperlukan untuk menerapkan desentralisasi. Selain itu, Dana Alokasi Umum memiliki karakteristik "*Grant Block*, yang memiliki arti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah masing-masing untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah". Menurut penelitian Anita et al. (2016), Dana Alokasi Umum tidak berdampak positif pada kemandirian keuangan daerah. Provinsi Jawa Timur dipilih sebagai objek penelitian dikarenakan merupakan salah satu Provinsi dengan jumlah Kabupaten/Kota terbanyak di Indonesia dan memiliki Tingkat perkembangan

ekonomi yang beragam. Terdapat Kabupaten/Kota dengan Pendapatan Asli Daerah Tinggi seperti Surabaya dan Sidoarjo, tetapi ada pula daerah yang masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Dengan kondisi tersebut, Provinsi Jawa Timur menjadi representasi yang menarik dalam memahami bagaimana Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum mempengaruhi Tingkat kemandirian keuangan daerah.

Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi perumusan strategi keuangan daerah yang lebih efektif dan mandiri serta menjadi referensi bagi kalangan akademisi dan pembuat kebijakan dalam mendorong Pembangunan daerah yang berkelanjutan. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka didapatkan untuk menjadi rumusan masalah sebagai berikut: (1) Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah?, (2) Apakah dana bagi hasil berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah?, (3) Apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah?. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah, (2) Menganalisis pengaruh dana bagi hasil terhadap kemandirian keuangan daerah, (3) Menganalisis dana alokasi umum terhadap kemandirian keuangan daerah.

## TINJAUAN TEORITIS

### Teori Stewardship

*Stewardship theory* biasanya digunakan dalam penelitian akuntansi organisasi sektor publik sebagai organisasi pemerintah dan non profit lainnya yang dari awal perkembangannya, akuntansi organisasi sektor publik sudah disiapkan dalam memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan *steward* dengan *principal* (Zoelisty dan adityawarman, 2014). Ada sebuah hubungan yang kuat dalam kepuasan pelanggan dan kesuksesan suatu organisasi, dalam teori tersebut. Dalam hubungannya dengan teori *stewardship*, penelitian ini menyelidiki cara pemerintah sebagai *steward* dengan tujuan pengelolaan sumber daya dan masyarakat sebagai *principal* sebagai pemilik sumber daya. Dengan demikian, karena ada hubungan kesepakatan antara pemerintah dalam pengelolaan sumber daya dan masyarakat sebagai pemilik sumber daya, maka pemerintah akan mengelola pendapatan yang diterimanya dari baik pemerintah pusat maupun masyarakat untuk membantu menjalankan pemerintahannya.

### Pendapatan Asli Daerah

Pada Pendapatan Asli daerah didefinisikan sebagai sebuah pendapatan yang dihasilkan dari sumber pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sebagai bagian dari asas desentralisasi, ini dimaksudkan agar memudahkan daerah untuk mencari dana untuk proses penyelenggaraan pemerintah sendiri. Pendapatan yang dihasilkan secara eksklusif oleh daerah disebut dalam pendapatan asli daerah jika sumber-sumber yang dapat dioptimalkan agar pengelolaan atas kekayaan asli daerah dan partisipasi masyarakat sekitar dioptimalkan, seperti sumber pajak daerah, retribusi daerah, laba dari BUMN dan Pendapatan daerah yang sah lainnya (Vergina, 2017).

### Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil merupakan sebuah pajak dan sumber daya alam yang terdiri dari berbagai pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak penghasilan (PPh), yang masing-masing merupakan bagian dari wajib pajak atas orang pribadi dalam negeri dan PPh 21.

### Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum, yang didanai atas pendapatan sebuah APBN, diberikan kepada daerah sesuai kapasitas fiskal yang lebih rendah agar dapat mendanai kebutuhan daerah selama melaksanakan desentralisasi. Ini merupakan salah satu cara untuk mengatasi masalah

terkait ketimpangan fiskal antar daerah dan juga memberikan sumber pembiayaan daerah. Dalam sebuah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penggunaan dana alokasi umum dan penerimaan umum lainnya harus difokuskan pada tercapainya sebuah tujuan pemberian otonomi daerah kepada daerah, yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan terhadap masyarakat, seperti sebuah pelayanan Kesehatan dan Pendidikan. Tujuan pengalokasian dari dana alokasi umum sendiri yaitu untuk memastikan kemampuan antar daerah untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan di seluruh daerah dalam rangka memberikan terkait pelayanan dasar kepada masyarakat yang belum memenuhi standar.

**Kemandirian Keuangan Daerah**

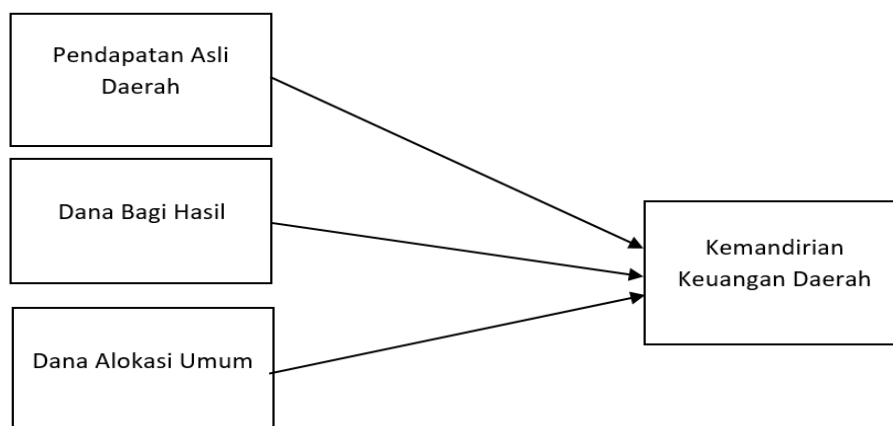
Dalam kemampuan pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk dapat membiayai kebutuhan sendiri dari berbagai bentuk kegiatan pemerintah, Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat melalui pembayaran pajak dan juga retribusi sebagai bentuk sumber pendapatan yang dibutuhkan daerah. Suatu daerah dianggap mandiri jika pendapatannya seberapa bergantung pada suatu daerah pada tingkatan partisipasi dari pemerintah pusat yang berkontribusi pada pendapatan. Pemerintah pada setiap daerah harus dapat berusaha untuk meningkatkan kualitas pada layanan publik serta dapat memperbaiki segala bentuk sektor yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah untuk menciptakan terkait pada kemandirian keuangan daerah. Rasio kemandirian dapat dilihat dari tolak ukur kemandirian sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Pola Hubungan Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Keuangan daerah**

Kemampuan Keuangan	kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25%	Instruktif
Rendah	25%-50%	Konsultatif
Sedang	50%-75%	Partisipatif
Tinggi	75%-100%	Delegative

Sumber: Halim 2007

**Rerangka Pemikiran**



**Gambar 1**  
**Rerangka pemikiran**

## **Pengembangan Hipotesis**

### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah**

Salah satu sumber penerimaan daerah yaitu pendapatan asli daerah yang berasal dari daerah. Daerah dapat menggunakannya sendiri yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Pemerintah daerah dapat membangun infrastruktur dengan menggunakan pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) berasal dari berbagai sumber hasil pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan yang sah lainnya. Pemerintah daerah menggunakan pendapatan asli daerah untuk membiayai belanjanya sendiri, jadi mereka harus berusaha meningkatkan dengan meningkatkan dan memanfaatkan potensi yang mereka miliki. Pendapatan asli daerah memainkan sebuah peran penting untuk mempengaruhi kemandirian daerah. Salah satu faktor yang menentukan Tingkat kemandirian suatu negara yaitu dengan pendapatan asli daerah.

Oleh karena itu, daerah dituntut untuk dapat mengatur dan juga mengelola sumber daya atau potensial daerahnya menjadi lebih baik dan efektif guna untuk meningkatkan pendapatan asli daerah itu sendiri. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurafni dan Muslimin (2018), Neneng dan Nisa (2018), menunjukkan bahwa sebuah pendapatan asli daerah dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini dapat diartikan sebagai bahwa semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin besar pula Tingkat kemandirian, begitu pula sebaliknya semakin kecil PAD yang didapatkan oleh suatu daerah maka akan semakin kecil Tingkat kemandirian daerah. Dengan demikian pada penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Positif Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

### **Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah**

Dana bagi hasil adalah dana yang diberikan kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN berdasarkan persentase tertentu. Dana ini diberikan dengan tujuan yaitu untuk mengurangi disparitas keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah saat melaksanakan desentralisasi.

Jika pemerintah daerah ingin mendapatkan lebih banyak dana bagi hasil, mereka juga dapat mengupayakan pendapatan dari pajak dan sumber pendapatan daerah lainnya untuk meningkatkan sebuah kontribusi dana bagi hasil terhadap pendapatan asli daerah. Dengan adanya dana ini, pemerintah daerah akan dapat melakukan tugas yang diberikan pemerintah pusat secara mandiri. Dalam penelitian yang dilakukan pada peneliti terdahulu seperti Triganda (2018) yang menunjukkan bahwa suatu dana bagi hasil memberikan pengaruh positif terhadap Tingkat kemandirian keuangan daerah di sebuah Provinsi Riau pada tahun 2012-2015. Dengan demikian bahwa penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Dana Bagi Hasil Berpengaruh Positif Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

### **Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah**

Dalam pendanaan kebutuhan pembelanjaan daerah dalam rangka melaksanakan desentralisasi, pemerintah pusat memberikan sebuah Dana Alokasi Umum (DAU), yang merupakan salah satu transfer dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang berasal dari pendapatan APBN. Salah satu dana perimbangan yaitu DAU. Dana perimbangan adalah suntikan dana yang bersumber dari pemerintah pusat ke daerah untuk digunakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kemandirian daerah, yang dilanda dengan peningkatan persentase daerah. Saat menerima sebuah dana alokasi umum, pemerintah daerah dapat dianggap sebagai bagian dari sebuah pendapatan daerah yang berasal dari transfer pusat. Selanjutnya, keuntungan tersebut dapat digunakan untuk operasional pemerintah daerah.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Anita et.al (2016), yang menyatakan bahwa dana alokasi umum mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan hasil penelitian dari Nurafni (2018) juga menyatakan bahwa dana alokasi

umum memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian daerah pada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada Kabupaten/Kota. Hal ini dapat dikatakan bahwa semakin tinggi Tingkat dana alokasi umum yang diterima suatu daerah, maka Tingkat kemandirian daerah cenderung semakin rendah. Dengan demikian penelitian merumuskan dengan hipotesis sebagai berikut:

H3: Dana Alokasi Umum Berpengaruh Negatif Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian Dan Gambaran Dari Populasi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif metode kuantitatif sebagai metode penelitian berdasarkan pada sifat positifisme yang dapat digunakan sebagai meneliti pada populasi atau sampel tertentu, sedangkan pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data juga bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiono, 2017). Populasi pada penelitian ini yaitu Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Jawa Timur, yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota. data penelitian ini menggunakan 3 tahun data terakhir yaitu tahun 2021-2023 laporan realisasi APBD.

### Teknik Pengambilan Sampel

Pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling* yaitu dimana teknik pengambilan sampel yang berdasarkan dengan kriteria tertentu. Teknik sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *sampling jenuh*, menggunakan sampling tersebut karena populasi pada penelitian ini hanya 38 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur Dimana terdiri 29 Kabupaten dan 9 Kota. Sampel terdiri dari: (1) tersedia data APBD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur pada Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur selama 2021-2022, (2) Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang telah mempublikasikan laporan realisasi APBD pada website resmi DJPK Republik Indonesia pada tahun 2021-2023.

### Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini metode pengumpulan data dapat dapat menggunakan data sekunder yang dihasilkan secara tidak langsung tetapi melalui media perantara, dokumentasi untuk mengumpulkan dokumen resmi, literatur dan studi Pustaka dan sebuah teknik pengumpulan data statistik. Data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran APBD pada tahun 2021-2023 yang diperoleh dari instansi pemerintah yaitu pada Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Republik Indonesia dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Timur.

### Variabel Dan Definisi Operasional Variabel

#### Pendapatan Asli Daerah

Pada sebuah Undang-Undang No. 1 Tahun 2022, menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang digali untuk digunakan Sebagian besar pada modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha daerah untuk memperkecil dalam ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Sedangkan menurut Halim (2007:96) pendapatan asli daerah adalah semua sumber ekonomi asli daerah. Menurut Yani (2002:51) pendapatan asli daerah yaitu pendapatan yang diambil berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Biasanya indikator yang digunakan dalam mengukur variabel ini menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{PAD} = \frac{\text{Pajak daerah} + \text{Retribusi daerah} + \text{Hasil pengelolaan} \\ \text{kekayaan yang dipisahkan} + \text{Lain-lain PAD yang sah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Total Pendapatan

### Dana Bagi Hasil

Dalam salah satu komponen dana perimbangan ialah dana bagi hasil yang mempunyai peran penting untuk menyelenggarakan sebuah otonomi daerah, karena didasari pada potensi daerah untuk menghasilkan sumber pendapatan yang cukup besar. Selain dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus juga merupakan sebagai salah satu modal dasar pada pemerintah daerah untuk mendapatkan dana sebagai Pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal pada pendapatan asli daerah. Sehingga jika pemerintah daerah menginginkan mendapatkan dana transfer bagi hasil yang tinggi, maka mereka harus dapat mengoptimalkan potensi pajak dan sumber daya alam mereka. Ini akan memungkinkan dalam kontribusi dana bagi hasil terhadap pendapatan daerah menjadi lebih besar. Indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur variabel ini digunakan rumus sebagai berikut:

$$DBH = \frac{\text{Dana bagi hasil pajak} + \text{dana bagi hasil sumber daya alam}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

### Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum sendiri yaitu dana yang dialokasikan dari dana pendapatan atas APBN yang kemudian dialokasikan dengan memiliki tujuan mendistribusikan kemampuan keuangan antar daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah selama pelaksanaan desentralisasi. Yani (2002:142) dengan ini menggunakan formulasi yang mempertimbangkan tentang kebutuhan dan potensi setiap daerah, tujuan dalam dana alokasi umum sendiri adalah untuk mengurangi disparitas kemampuan keuangan antar daerah. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini digunakan rumus sebagai berikut:

$$DAU = \frac{\text{Celah fiskal} + \text{Alokasi dasar}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Celah fiskal = Kebutuhan fiskal-Kapasitas fiskal

Alokasi dasar = 90% x 25% x PDN x Bobot Kabupaten/Kota

### Kemandirian Keuangan Daerah

Variabel dependen atau sering disebut variabel terikat adalah sebuah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi sebuah akibat adanya variabel bebas yang sering disebut variabel independensi (Sugiono, 2017). Variabel dependen pada penelitian ini adalah tentang Kemandirian Keuangan Daerah yang biasanya dapat diukur dengan sebuah Rasio Kemandirian. Dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan pusat+ pinjaman}} \times 100\%$$

### Teknik Analisis Data

#### Analisis Statistik Deskriptif

Pada statistik deskriptif adalah metode statistik biasanya digunakan untuk meringkas, mengatur, dan menyajikan data agar lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Statistik deskriptif biasanya melibatkan perhitungan nilai dasar, seperti rata-rata, medium, modus, variasi, standar deviasi, rentang, serta penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram. Tujuan dari statistik deskriptif yaitu untuk memberikan Gambaran singkat mengenai data tanpa membuat inferensi lebih lanjut atau pengujian hipotesis. Pada Analisis deskriptif sangat penting dalam memahami karakter dasar pada data dan untuk mengidentifikasi pola yang mungkin ada, yang dapat membantu dalam pengambilan Keputusan dan Langkah analisis lebih lanjut.

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Dalam pengujian tersebut mempunyai tujuan agar menentukan apakah model regresi, variabel dependen dan variabel independen memiliki sebuah distribusi residual seperti dengan analisis grafik normal *probability plot*. Jikalau distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data yang sesungguhnya dapat mengikuti garis diagonal. Uji Kolmogorov-Smirnov sendiri yaitu apabila dalam nilai dibawah 0,05 dapat diartikan data yang diuji tidaklah normal dan jika nilai di atas 0,05 berarti data dapat dikatakan normal.

#### Uji Multikolinearitas

Dalam uji ini memeriksa adakah terdapat sebuah korelasi yang tinggi antara variabel independen. Karena multikolinearitas dapat menyebabkan ketidakakuratan dalam mengestimasi parameter regresi dan membuat model kurang stabil. Sehingga sebuah pengujian tersebut dapat dilihat sesuai nilai *variance inflation factor* (VIF) dan *tolerance value*. Apabila pada *tolerance value* > 0,10 dan VIF < 10 sehingga dinyatakan tidak terdapat gejala multikolinearitas.

#### Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas biasanya digunakan sebagai menguji sebuah asumsi dalam model regresi ketika adanya ketidaksetaraan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Biasanya model regresi yang baik adalah Dimana varian dari sebuah residual satu ke residual lain tetap atau tidak akan terjadi heteroskedastisitas. Dapat dikatakan heteroskedastisitas apabila terjadi: (1) Titik-titik pada penyebarannya membentuk sebuah pola tertentu yang membentuk sebuah gelombang, melebar, dan kemudian menyempit, (2) Titik-titik pada data menyebar di bagian atas dan di bagian bawah skala angka 0.

#### Uji Autokorelasi

Dalam uji tersebut menguji tentang adakah terdapat hubungan antar residual pada observasi yang berurutan. Autokorelasi terjadi ketika nilai residual pada satu observasi dipengaruhi oleh nilai residual sebelumnya, yang biasanya terjadi dalam masalah data deret waktu. Metode yang digunakan yaitu Uji Durbin-Watson yang mempunyai nilai antara 1,5 dan 2,5 menunjukkan tidak adanya autokorelasi sedangkan nilai di luar rentang tersebut menunjukkan adanya autokorelasi.

#### Analisis Regresi Linier Berganda

Pada analisis regresi sendiri yaitu sebuah analisis yang dapat digunakan dalam mengukur kekuatan sebuah hubungan antara dua variabel atau lebih yang dimana dalam hal tersebut menjelaskan adanya ketergantungan pada variabel independen yang terjadi dalam variabel dependen. Pada model persamaan analisis regresi sebagai berikut:

$$KKD = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 DBH + \beta_3 DAU + e$$

Keterangan:

KKD : Kemandirian Keuangan Daerah

$\alpha$  : Konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$ : Koefisien dari variabel independen

X1 : Pendapatan Asli Daerah

X2 : Dana Bagi Hasil

X3 : Dana Alokasi Umum

e : error

### Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Pada pengujian ini dapat digunakan sebagai mengukur besarnya sebuah persentase varian yang pengaruhnya diterangkan oleh sebuah variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol (0) dan satu (1). Dalam nilai koefisien determinan kecil memiliki pengertian bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas (Ghozali, 2018: 97). Jika nilai koefisien determinasi mendekati satu maka semakin baik regresi tersebut, dan jika mendekati nol maka variabel independen secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabel dependen.

### Uji F

Pada Uji F digunakan sebagai mengevaluasi adakah model regresi yang dibangun layak atau signifikan secara statistik dalam menjelaskan sebuah variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Kriteria pengujian ini jika nilai p-value dari uji F < 0,05, maka H0 ditolak, sehingga variabel independen secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, begitupun sebaliknya jika nilai uji F > 0,05 maka dapat diartikan menerima Ha.

### Uji t

Menurut peneliti Ghozali (2018: 98) uji statistik t pada dasarnya ditunjukkan sejauh mana pengaruh variabel independen menjelaskan variasi variabel dependen. Dalam menentukan Keputusan yang digunakan dalam uji t terdapat sebuah kriteria pengujian sesuai sebagai berikut: (1) Jika nilai signifikansi < 0,05, maka dapat diartikan sebagai variabel independen dapat berpengaruh terhadap dependen, (2) Jika nilai signifikan > 0,05 maka variabel independen tidak berpengaruh pada variabel dependen.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Analisis Statistik Deskriptif

hasil analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4 berikut:

**Tabel 4**  
Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	114	7.40	60.45	199.916	938.437
DBH	114	4.13	72.19	98.037	934.002
DAU	114	12.82	48.06	385.923	754.870
KKD	114	8.62	152.87	282.327	2.352.856
Valid N (listwise)	114				

Sumber: Data Sekunder, diolah 2025

Hasil dari uji analisis deskriptif ini menggunakan 114 data yang diobservasi. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwasanya nilai tertinggi dan nilai terendah mempunyai nilai yang cukup ekstensif sehingga menyebabkan data yang digunakan tidak berdistribusi normal, yang memiliki arti asumsi normalitas dalam regresi tidak terpenuhi. Hal ini dapat mempengaruhi validitas inferensi statistik, terutama dalam pengujian hipotesis dan interpretasi koefisien regresi. Adapun penyebab terjadinya outline dalam data adalah kesalahan pengukuran, kesalahan pencatatan, variasi alamiah dalam data atau perubahan

kondisi yang eksternal. Hasil statistik deskriptif di atas dapat memberikan penjabaran variabel dependen dan variabel independen sebagai berikut:

Variabel Pendapatan Asli Daerah mempunyai nilai minimum sebesar 7,40% yang menunjukkan bahwasanya pendapatan asli daerah masih sangat rendah sehingga belum dapat membiayai daerahnya sendiri, dengan nilai maximum sebesar 60,45% berarti daerah tersebut dapat menggali potensi pada daerahnya. nilai rata-rata (*mean*) didapat dengan nilai sebesar 19,9916% yang di mana dapat dinilai bahwa masih berada di tingkat kurang yang artinya masih ada daerah yang belum dapat mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah. Sedangkan nilai Standar Deviasinya sebesar 9,38437%. Dalam kedua nilai yaitu nilai rata-rata yang lebih besar daripada standar deviasi dapat disimpulkan sebagai hasil yang diperoleh baik, dikarenakan standar deviasi mencerminkan adanya penyimpangan.

Variabel Dana Bagi Hasil mempunyai nilai minimum sebesar 4,13% yang menunjukkan bahwa dalam kontribusi dana bagi hasil terhadap pendapatan daerahnya rendah, dengan nilai maksimum sebesar 72,19% yang di mana dapat diartikan bahwasanya daerah masih terdapat ketergantungan terhadap pemerintah pusat yang tinggi. Nilai rata-rata (*mean*) didapat dengan nilai sebesar 9,8037% yang memiliki artian bahwa belum meratanya pembagian dana bagi hasil yang pembagiannya didasari pada potensi daerahnya. Nilai standar deviasi sebesar 9,34002%. Dalam kedua nilai yaitu nilai rata-rata yang lebih besar daripada standar deviasi dapat disimpulkan sebagai hasil yang diperoleh baik.

Variabel Dana Alokasi Umum dalam distribusi ini memiliki variasi yang cukup signifikan, dengan nilai minimum sebesar 12,82% dan nilai maksimum sebesar 48,06%. Rata-rata (*mean*) sebesar 38,5923% menunjukkan bahwa sebagian besar daerah memiliki alokasi yang mendekati angka tersebut. Dengan standar variasi sebesar 7,54870%, distribusi dana alokasi umum memperlihatkan tingkat penyebaran yang moderat, mengidentifikasi adanya perbedaan dalam alokasi yang diterima oleh berbagai daerah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada daerah yang menerima alokasi lebih kecil, sehingga sebagian besar berada di sekitar nilai rata-rata dengan variasi yang tidak terlalu berlebihan.

Variabel Kemandirian Keuangan Daerah dalam pendistribusian ini menunjukkan tingkat variasi yang cukup tinggi, dengan nilai minimum sebesar 8,62% dan nilai maksimum mencapai 152,87%. Dan juga rata-rata (*mean*) kemandirian keuangan daerah 28,2327% mengidentifikasi bahwasanya sebagian besar daerah masih memiliki tingkat kemandirian yang relatif rendah. Dengan standar deviasi sebesar 23, 52856%, terdapat penyebaran yang signifikan dalam data, menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antar daerah. Beberapa daerah memiliki kemampuan mencapai tingkat kemandirian yang sangat tinggi, sedangkan sebagian daerah masih bergantung pada sumber pendanaan eksternal. Dari kedua nilai yaitu nilai rata-rata yang lebih besar dari standar deviasinya maka dapat diartikan bahwa nilai hasil dari data yang diperoleh baik.

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Hasil uji normalitas dengan bantuan alat grafik normal p-p plot adalah masih memiliki titik-titik atau sebuah data yang menyebar yang tidak mengikuti arah dimana garis diagonalnya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya data yang digunakan dalam penelitian ini tidak berdistribusikan normal atau dapat diartikan sehingga dilakukan *outlier*, diatas setelah dilakukan outlier dapat dilihat bahwasanya menunjukkan Dimana titik-titik atau data tersebut telah menyebar dekat dengan garis diagonal serta telah mengikuti arah garis diagonalnya. Maka dapat diartikan data yang diuji telah berdistribusi normal.

Dalam uji kedua statistik menggunakan *Kolmogorov-smirnov*. Dimana dalam pengambilan Keputusan adalah apabila nilai signifikan dibawah nilai 0,05 yang memiliki arti bahwa data yang diuji tidak berdistribusi normal. Namun jika sebaliknya jika nilai signifikan di atas 0,05 berarti data tersebut berdistribusi normal.

### Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas diketahui bahwa hasil nilai tolerabilitas dalam setiap variabel independensi menunjukkan lebih dari 0,10. Untuk hasil VIF untuk setiap variabel independensi menunjukkan nilai kurang dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya hal tersebut tidak menunjukkan adanya multikolinearitas antar variabel independensi.

### Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan pengujian ini bahwasanya p-value untuk semua variabel bernilai lebih besar dari alpha 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi residual identik telah terpenuhi atau tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi. Dan juga dibuktikan dengan *scatterplot*, bahwa titik-titik dalam *scatterplot* tidak membentuk pola corong, sehingga dapat diidentifikasi bahwa tidak terjadinya kasus heteroskedastisitas dalam model regresi atau asumsi residual identik telah terpenuhi.

### Uji Autokorelasi

Dapat diketahui bahwa asumsi residual independen telah terpenuhi atau tidak terjadi autokorelasi data. Hal tersebut ditunjukkan melalui nilai Durbin-Watson senilai dengan 1,772 yang berada diantara -2 sampai dengan +2. Sehingga dinyatakan bahwa model regresi pada penelitian ini terbebas dari autokorelasi.

### Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam pengelolaan data menggunakan SPSS 26 diketahui sebagai berikut:

**Tabel 10**  
**Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
1 (Constant)	.426	.124
PAD	1.247	.015
DBH	-.054	.009
DAU	-.213	.023

a. Dependent Variable: KKD

Sumber: Data Sekunder, diolah 2025

Pada Tabel 10 di atas menjadikan persamaan regresi berganda dengan memperhatikan pada nilai beta dan juga serta tanda positif dan negatif yang menjadikan penentu arah antara hubungan variabel independen dan juga variabel dependen. Adapun persamaan regresi penelitian sebagai berikut:

$$KKD = \alpha + \beta_1PAD + \beta_2DBH + \beta_3DAU + e$$

$$KKD = 0,426 + 1,247PAD - 0,054DBH - 0,213DAU + e$$

Dengan adanya persamaan tersebut, dapat kita simpulkan sebagai berikut: Pertama pada nilai konstanta ( $\alpha$ ) yang merupakan interpretasi sebuah variabel independen. Jika nilai variabel independen nol (0) maka hal tersebut menunjukkan bahwa variabel dependen yang dipakai dalam sebuah model penelitian ini sebesar konstanta tersebut. Atau dapat diartikan dengan nilai konstanta  $\alpha = 0,426$  tersebut menunjukkan jika nilai dari PAD, DBH, dan DAU sama dengan nilai nol (0), sehingga KKD adalah 0,426.

Kedua pada koefisien dari pendapatan asli daerah memiliki nilai sebesar 1,247. Dalam nilai koefisien pada pendapatan asli daerah menunjukkan sebuah arah positif. Hal ini dapat

disimpulkan bahwa semakin tinggi sebuah pendapatan asli daerah yang didapat, maka akan diikuti dengan kenaikan pada Tingkat kemandirian keuangan daerah. Begitu pula sebaliknya jika pendapatan asli daerah menurun maka Tingkat kemandirian keuangan daerah juga akan ikut menurun.

Ketiga koefisien pada dana bagi hasil memiliki nilai sebesar -0,054. Pada nilai koefisien ini menunjukkan sebuah arah hubungan negatif atau berlawanan antara dana bagi hasil dengan kemandirian keuangan daerah. Jika dana bagi hasil mengalami peningkatan sebesar 0,054 maka kemandirian keuangan daerah dapat menurun sebesar 0,054. Dengan kata lain jika dana bagi hasil meningkat maka Tingkat kemandirian keuangan daerah akan mengalami penurunan, dengan asumsi variabel lain tetap.

Dan terakhir koefisien dari dana alokasi umum mempunyai nilai sebesar -0,213. Hal ini dapat menunjukkan adanya sebuah arah hubungan yang negatif atau berlawanan arah antara dana alokasi umum dengan kemandirian keuangan daerah. Dalam artian jika dana alokasi umum memiliki peningkatan sebesar 0,213 maka kemandirian keuangan daerah akan ada penurunan sebesar 0,213. Yang dapat diartikan bahwa jika dana alokasi umum memiliki peningkatan maka Tingkat kemandirian akan mengalami penurunan. Begitupun sebaliknya jika dana alokasi memiliki penurunan maka Tingkat kemandirian keuangan daerah akan meningkat, dengan asumsi variabel lain tetap.

### **Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Berdasarkan pada hasil nilai koefisien determinasi pada R square sebesar 0,991 yang memiliki arti bahwa pada variabel independensi Dimana dalam sebuah penelitian ini adalah pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum dapat menjelaskan variabel independen yaitu kemandirian keuangan daerah dengan sebesar 0,991 sedangkan sisa dalam perhitungan akan dijelaskan dalam variabel lainnya dari luar penelitian ini.

### **Uji F**

Pada kriteria pengujian ini dapat dilihat dengan melihat signifikan F terhadap hasil output regresi dengan melihat derajat pada kepercayaan ( $\alpha$ ) 5%. Jika nilai signifikansi lebih besar dari  $\alpha$  maka hipotesis akan ditolak, sedangkan jika nilai signifikan lebih kecil dari  $\alpha$  maka hipotesis diterima yang memiliki arti bahwa model regresi tersebut layak. Nilai signifikan penelitian ini adalah 0,000.

### **Uji t**

Berdasarkan pada Tabel 13 diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, pada pengujian hipotesis antara variabel (X1) Pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah mempunyai nilai yang signifikansi sebesar 0,000. Hal ini ditunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari nilai p-value dengan nilai beta 1,247. Jadi karena nilai signifikansi  $0,000 < 0,005$  disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima. Hal ini ditunjukkan dengan pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Kedua, pada pengujian hipotesis diantara variabel (X2) dana bagi hasil terhadap kemandirian keuangan daerah. Dalam hasil penelitian ini menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal ini ditunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari nilai p-value dengan nilai beta -0,054. Jadi karena nilai signifikansi  $0,000 < 0,005$  memiliki nilai yang signifikansi tetapi pada nilai beta terdapat tanda negatif dapat kita simpulkan bahwa nilai beta berlawanan arah dan dapat memberikan pengaruh negatif, sehingga pada variabel dana bagi hasil ditolak, tolak H2.

Ketiga, pada pengujian hipotesis antara variabel (X3) dana alokasi umum terhadap kemandirian keuangan daerah. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana alokasi umum mempunyai nilai yang signifikansi sebesar 0,000. Hal ini ditunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari nilai p-value dengan nilai beta sebesar -0,213. Sehingga pada nilai

signifikansi  $0,000 < 0,005$  disimpulkan bahwa dana alokasi umum memiliki signifikansi tetapi karena ada tanda negatif terhadap beta sehingga dapat kita simpulkan bahwa nilai beta memberikan perlawanan arah dan dapat memberikan pengaruh negatif, sehingga pada variabel dana alokasi umum ditolak, tolak  $H_3$ .

## **Pembahasan**

### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah**

Sesuai dengan hasil pengujian untuk variabel pendapatan asli daerah pada Tabel ke 14, dapat dilihat bahwa  $H_1$  yang memiliki arti bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah sehingga diterima. Jadi ketika pendapatan asli daerah semakin tinggi yang diterima suatu daerah, mengakibatkan daerah tersebut semakin mandiri dalam pembiayaan kebutuhannya sendiri. Pendapatan asli daerah ini dimaksud sebagai sumber penerimaan utama dalam suatu daerah. Dalam kontribusi pendapatan asli daerah sangat ditentukan dengan penerimaan pada setiap tahunnya. Sumber utama sendiri dari pendapatan asli daerah dipengaruhi dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dikarenakan dari dua komposisi tersebut adalah penyumbang utama dalam pendapatan asli daerah. Sehingga apabila pemerintah daerah dapat menghasilkan pajak daerah dan retribusi daerahnya maka akan meningkatnya pendapatan asli daerahnya sehingga tidak bergantung sepenuhnya pada dana transfer dari pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan daerahnya. Sesuai dengan nilai rata-ratanya, Kabupaten/Kota di Jawa Timur dalam kontribusi pendapatan asli daerah masih berada di Tingkat kurang, terlebih adanya pandemi yang terjadi sehingga menurunkan pendapatan tetapi tetap mandiri karena pemerintah daerah telah membatasi pada dana belanjanya.

Dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurafni dan Muslimin (2018), yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah dan memiliki nilai yang signifikan. Hasil yang sama juga dari Nisa (2018), menunjukkan bahwa pendapatan daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

### **Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Kemandirian Keuangan Daerah**

Sesuai dengan hasil dari pengujian hipotesis untuk variabel dana bagi hasil pada Tabel 14, dapat kita lihat bahwa  $H_2$  yang memiliki makna bahwa dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah ditolak. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Yang Dimana bahwasanya kenaikan atau penurunan pada dana bagi hasil yang diperoleh pada pemerintah daerah tidak mempengaruhi kemandirian keuangan daerah. Sesuai dasarnya bahwa dana bagi hasil merupakan dana yang dialokasikan untuk daerah yang pembagiannya telah disesuaikan pada potensi yang dimiliki dengan mempunyai tujuan untuk mengurangi ketimpangan antar daerah. Ketika semakin tinggi dana bagi hasil yang diharapkan suatu daerah menjadikan mandiri dengan tujuan harapan pemerintah daerah dapat lebih mengoptimalkan potensi pada pajak dan sumber daya alam yang dimiliki. Tetapi pada dasarnya masih banyak terjadinya sebuah pembagian dana bagi hasil yang tidak merata dan juga pembagian yang tidak tepat pada waktunya. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai rata-rata sebesar 9,8037 % yang lebih dekat dengan nilai minimum daripada nilai maksimum. Belum ratanya pembagian hasil dikarenakan pembagian berdasarkan pada potensi daerah penghasil, sedangkan pada tiap tahun suatu daerah mempunyai perbedaan yang besar dalam jumlah penduduk, sumber daya manusia dan sumber daya alamnya. Dalam keterlambatan pada pembagian dana bagi hasil pajak disebabkan adanya penerapan alokasi definitif yang sesuai realitas penerimaan PPh sesungguhnya. Karena ada hal tersebut mengakibatkan bahwa sebuah perencanaan Pembangunan daerah dapat terganggu. Apabila proses Pembangunan terganggu menjadikan kemandirian akan sulit tercapainya.

Dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhasanah dan Maria (2017), yang menyatakan bahwa dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap Tingkat kemandirian keuangan daerah pada penelitian Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2010-2013.

### **Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Keuangan Daerah**

Sesuai dengan pengujian yang dilakukan pada hipotesis untuk variabel dana alokasi umum pada Tabel 14, dapat kita lihat H3 yang memiliki makna bahwa dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah diterima. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah tetapi signifikansi terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar dana alokasi umum yang diterima suatu daerah, semakin rendah kinerja keuangan daerahnya.

Dana alokasi umum merupakan dana transfer dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk membantu daerah dalam membiayai kebutuhan belanja daerah, termasuk dalam belanja pegawai dan belanja operasional lainnya. Namun, adanya ketergantungan yang tinggi terhadap dana alokasi umum seringkali mengurangi motivasi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dan mengelola keuangan secara efisien. Dampak negatif dari dana alokasi umum terhadap kemandirian keuangan daerah dapat disebabkan oleh pola pengelolaan anggaran yang kurang optimal. Banyak suatu daerah yang mengalokasikannya Sebagian besar untuk belanja rutin, terutama belanja pegawai, dibandingkan belanja modal yang dapat meningkatkan produktivitas ekonomi daerah. Hal ini menyebabkan penggunaan dana alokasi umum tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan daerah dalam jangka Panjang. Selain itu, suatu daerah yang terlalu mengandalkan dana alokasi umum cenderung kurang inovatif dalam menggali potensi sumber pendapatan lain, sehingga menciptakan ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan penggunaan dana alokasi umum dengan lebih fokus pada belanja produktif yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan mengurangi ketergantungan dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah secara mandiri, diharapkan kinerja keuangan daerah dapat meningkat, sehingga mampu mendukung Pembangunan daerah secara lebih berkelanjutan.

Dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anita et al (2016), yang menyatakan bahwa dana alokasi umum mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Variabel independen yang digunakan adalah Pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum. Sedangkan variabel dependen adalah kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan pada penelitian ini yang menggunakan Analisis regresi linier berganda untuk menguji hipotesis maka menunjukkan bahwa: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Semakin tinggi PAD yang diperoleh suatu daerah, semakin besar kemampuannya untuk membiayai kebutuhannya secara mandiri tanpa ketergantungan pada pemerintah pusat. Hal ini menegaskan pentingnya optimalisasi penerimaan daerah dari sektor pajak dan retribusi guna meningkatkan otonomi fiskal daerah. (2) Dana Bagi Hasil (DBH) pengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Karena ketergantungan yang tinggi terhadap transfer dari pemerintah pusat menyebabkan daerah cenderung kurang inovatif dalam menggali potensi pendapatan lain. (3)

Dana Alokasi Umum (DAU) menunjukkan pengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Ketergantungan yang tinggi terhadap transfer dari pemerintah pusat menyebabkan daerah cenderung kurang inovatif dalam menggali potensi pendapatan lain. Hal ini menurunkan dorongan untuk mengelola keuangan secara lebih efisien dan berkelanjutan. Hasil penelitian ini menggaris bawahi perlunya strategi peningkatan PAD melalui kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan efisiensi dalam pengelolaan dana transfer. Dengan demikian, diharapkan daerah dapat lebih mandiri dalam mengelola keuangannya dan tidak terlalu bergantung pada dana dari pemerintah pusat.

### Saran

Berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan yaitu: (1) pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas fiskalnya dengan menggali potensi pendapatan asli daerah melalui inovasi kebijakan perpajakan dan retribusi daerah. Selain itu, pengelolaan keuangan daerah harus lebih efisien dengan memprioritaskan belanja yang bersifat produktif guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal. (2) penelitian di masa depan dapat mempertimbangkan faktor-faktor tambahan yang berkontribusi terhadap kemandirian keuangan daerah, seperti kebijakan investasi, efektivitas pengelolaan aset daerah, dan faktor sosial ekonomi lainnya. Dengan demikian, analisis yang lebih komprehensif dapat memberikan rekomendasi yang lebih kuat bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan otonomi fiskal mereka.

### DAFTAR PUSTAKA

- Achla, N., dan Fidiana. 2022. Kemandirian keuangan daerah berdasarkan pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, pertumbuhan ekonomi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 11(5).
- Anikmah, M., dan Sugiyanto, H. (2021). Pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan dana keistimewaan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. *Artikel Akuntansi, Auditing dan Keuangan Vokasi*, 5(1).
- Anita, L. 2016. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal dan Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Mediasi*, 8(2), 123-134.
- Debora, D. 2023. Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana transfer ke daerah terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Administro*.
- Delice, A. 2010. The sampling issues in quantitative research. *Educational Sciences: Theory and Practice*, 10(4), 2001–2018.
- Direktorat Jenderal PUM Kemendagri. 2015. *Kode dan data wilayah administrasi pemerintahan*.
- Erawati, N. T., dan Suzan, L. 2015. Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Bandung (Studi kasus pada DPKAD Kota Bandung periode 2009–2013). *E-Proceeding of Management*, 2(3), 3259–3266.
- Firmansyah, D. 2022. Teknik pengambilan sampel umum dalam metodologi penelitian. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*, 1(2), 85–114.
- Ghozali, I. 2018. *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25* (Edisi ke-9). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. 2004. *Akuntansi keuangan daerah* (Edisi revisi). Jakarta: Salemba Empat.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Teori, konsep, aplikasi akuntansi sektor publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ishak, M. 2023. Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah Kabupaten Soppeng tahun 2013–2022. *Tugas Akhir*. Unismuh Makassar.
- Khoirunisa, I., dan Sulaeman, A. S. 2022. Fiscal Desentralization: Is There a Simultaneous Relationship Between Regional Independence and Social Welfare?. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 8(2), 213-225.

- Marizka, R. 2013. Pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Sumatera Barat (Tahun 2006–2011). *Journal Tunas Bangsa*, 185–197.
- Monica, F., dan Sa'roni, C. 2022. Pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi: Studi kasus pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2010–2019. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 5(2), 819–833.
- Neneng, R. A., dan Nisa, N. W. 2018. Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah: Studi kasus pada Pemerintah Kota Tasikmalaya tahun 2006–2015. *Jurnal Akuntansi*, 13(1), 30–39.
- Nurafni, Muslimin, Kustianingsih dan Abdul Kahar. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Tingkat Kemandirian Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah. *Katalogis*, 6(6), 82-91.
- Nurhasanah, dan Maria. 2017. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemandirian kota di Provinsi Bengkulu. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 1(1), 60–73.
- Pasoloran, Oktavianus dan Rahman, Firdaus Abdul. 2019. Teori stewardship: Tinjauan Konsep dan Implikasinya pada Akuntabilitas organisasi Sektor Publik. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 3(2), 419-432.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Rivandi, M., dan Anggraini, Y. 2022. Pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2016–2021. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(6).
- Shinta, B., Fitrah, S., dan Ullya, R. 2022. Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. *Jurnal Syntax Transformation*, 3(5).
- Sugiyono. 2017. *Metode penelitian dan pengembangan*. Bandung: Alfabeta.
- Triganda, R. 2018. Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli ekonomi, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Riau tahun 2012–2015. *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Verginia, M. 2017. Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. *Tugas Akhir*. Politeknik Negeri Padang.
- Yani, A. 2002. *Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.